



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**KECAMATAN BANGSALSARI**

**TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dengan berlakunya Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 maka Organisasi Perangkat Daerah harus merubah susunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2016–2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Renstra ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renstra ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Kabupaten Jember Tahun 2016–2021 di bidang Administrasi Pemerintahan Umum. Adapun tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan seluruh Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategi Kecamatan Bangsalsari pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Bangsalsari, didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.



2018

C A M A T

**Drs. MURTADLO, M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19630407 198303 1 009

## DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I : Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika	4
BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD	6
2.1 Tupoksi	7
2.1.1 Tugas dan fungsi	7
2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan	15
2.1.3 Struktus Organisasi	19
2.2 Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.2.1 Keadaan sekarang	20
2.2.2 Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang	21
BAB III : Isu-isu strategis	24
BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan	37
4.1 Visi dan misi SKPD	38
4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD	38
4.3 Strategi dan kebijakan	39
BAB V : Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	43
BAB VI : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	50
Lampiran-lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana strategi Kecamatan Bangsalsari tahun 2016-2021 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bangsalsari) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Bangsalsari, maka disusunlah Renstra Kecamatan Bangsalsari sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemerintah telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis SKPD secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)

Renstra Kecamatan Bangsalsari memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2016-2021, maka penyusunan Renstra Kecamatan Bangsalsari dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember tahun 2016-2021, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- m. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
- n. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
- o. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
- q. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021.
- r. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud :**

- a. Penyusunan Renstra Kecamatan Bangsalsari dimaksud untuk menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan kecamatan Bangsalsari, untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan Bangsalsari dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- c. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima tahun).
- d. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

#### **2. Tujuan**

Penyusunan Renstra Kecamatan Bangsalsari bertujuan :

- a. untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Bangsalsari dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun Anggaran

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANGSALSARI
  - 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Bangsalsari
  - 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Bangsalsari
  - 2.3 Sumber Daya Kecamatan Bangsalsari
  - 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsalsari
  - 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangsalsari
- BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bangsalsari
  - 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
  - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bangsalsari
  - 4.2 Strategi dan Kebijakan

- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
  - 5.2 Indikator Kinerja
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN  
DAN SASARAN RPJMD

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANGSALSARI

Wilayah Kecamatan Bangsalsari secara Geografis terletak disebelah barat Ibukota Jember yang membujur dari utara ke selatan, dengan ketinggian kurang lebih 49 m dari permukaan laut,dengan batas-batas sebagai berikut :

- a.sebelah utara : Hutan /lereng pegunungan Hyang,
- b.sebelah timur : Kecamatan Rambipuji dan Panti,
- c.sebelah selatan : Kecamatan Balung dan Umbulsari,
- d.sebelah barat : Kecamatan Tanggul.

Kecamatan Bangsalsari terdiri dari 11 desa dengan nama-nama Desa sebagai berikut:

1. Desa Bangsalsari.
2. Desa Gambirono.
3. Desa Curah Kalong.
4. Desa Tugusari.
5. Desa Banjarsari
6. Desa Badean.
7. Desa Petung
8. Desa Tisnogambar
9. Desa Langkap
10. Desa Sukorejo
11. Desa Karangsono

- e. Luas wilayah : 106,78 Km
- f. Jumlah Penduduk : 116.634 jiwa
  - Jumlah Penduduk Perem : 60.116 jiwa
  - Jumlah Penduduk Laki - Laki : 56.518 jiwa
- g. Jumlah Rumah Tangga Miskin : 14.763 jiwa
- h. Jumlah Penduduk Miskin : 12.329.166 / th

## **2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. KECAMATAN**

Tugas dan Fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut :

#### **I. Camat.**

##### **1. Camat mempunyai tugas :**

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :**

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan

kinerja dan disiplin pegawai; dan

- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## II. SEKRETARIAT

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
  2. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;
  3. Penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan Rumah tangga; dan
  4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

### 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan program perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 1.2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
  - b. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;

- c. perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak;
- d. perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. pengengolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- g. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- h. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- i. pengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah;
- l. melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2.2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan usaha umum dan tata usaha Sekretariat, tata naskah dinas dan tata kearsipan;
  - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
  - c. perbaikan kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh Kecamatan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;

- e. mengurus kendaraan dan alat-alat lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- f. pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- g. penyelenggaraan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- h. penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- l. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### III. SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan desa/kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
  - b. penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
  - c. penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
  - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### IV. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
  - c. penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
  - d. pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan;
  - e. pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
  - f. pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
  - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### V. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. Penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. Penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- i. Penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan social serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. Pengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
- n. Penyusunan laporan pertanggungawaban atas pelaksanaan tugas.

## VI. SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah Kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. Pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
  - c. Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
  - d. Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
  - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## 2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan, maka Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Pelayanan Umum
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

### **Kelompok Jabatan Fungsional. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **1. Susunan Kepegawaian**

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Bangsalsari sebanyak : 28 orang yang terdiri dari:

#### **Keberadaan Pegawai Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

No	Kedudukan dan Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Camat	1		1
	- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	3	1	4
	- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2		2
3	Seksi Pemerintahan	2		2
4	Seksi PMD dan Kesos	3	1	4
5	Seksi Pelayanan umum	1	1	2
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	2
7	Sekdes	10		10

2) Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi Pegawai Kecamatan Bangsalsari yang keseluruhan berjumlah 46 Orang terdapat :

- 28 Orang berstatus Pegawai Negeri sipil (PNS)
- 18 Orang Non PNS (Sukwan)

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Bangsalsari menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada table

**Jumlah Pegawai menurut Status,Pangkat dan golongan  
(Per Oktober 2016)**

No	Status Kepegawaian	Gol / Ruang	UNIT KERJA DILINGKUNGAN KEC. BANGSALSARI							
			Camat	Sekret ..	Seksi Pemr	Seksi Trantib	Seksi PMD	Seksi Kesos	Seksi Pelum	Sekdes
1	<b>PNS</b>									
	Pembina Tk. I	IV/b	1							
	Pembina	IV/a		1						
	Penata Tk. I	III/d					1	1		
	Penata	III/c				1			1	
	Penata Muda Tk. I	III/b		1	1					
	Penata Muda	III/a		1						
	Pengatur Tk. I	II/d			1					
	Pengatur Muda	II/c					1		1	2
	Pengature Muda Tk. I	II/b		1			1			7
	Pengatur Muda	II/b								1
	Juru Muda	I/d						1		
	Juru	I/c								
	Juru Muda Tk. I	I/b								
	Juru Muda	I/a								
2	<b>Honorarium Daerah</b>									
	Rolstart			1						
	Sukwan			5		12				

3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Bangsalsari, adalah ebagai berikut :

Pegawai Negri Sipil (PNS) terdapat :

1. 1 Orang berpendidikan S-2
2. 6 Orang berpendidikan S-1
3. 16 Orang berpendidikan SMA/ sederajat
4. 1 Orang berpendidikan SMP/ sederajat

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Bangsalsari menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada table

**Jumlah Pegawai menurut Latar belakang Pendidikan  
(Per Oktober 2015)**

No	Status Kepegawaian	UNIT KERJA DILINGKUNGAN KEC. BANGSALSARI							
		Camat	Sekret..	Seksi Pemr	Seksi Trantib	Seksi PMD	Seksi Kesos	Seksi Pelum	Sekdes
1	<b>PNS :</b>								
	S 2	1							
	S 1		2	1	1	1	1	1	
	SLTA/Sederajad		2	1		2		1	10
	SLTP/sederajad						1		
2	<b>Honorarium</b>								
	SLTP/sederajad								

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh kecamatan Bangsalsari dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebanyak 379 buah dengan total nilai sebesar Rp. Rp. 1.365.775.740,- yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada table dibawah ini :

### Daftar nama Barang dan Harga Barang

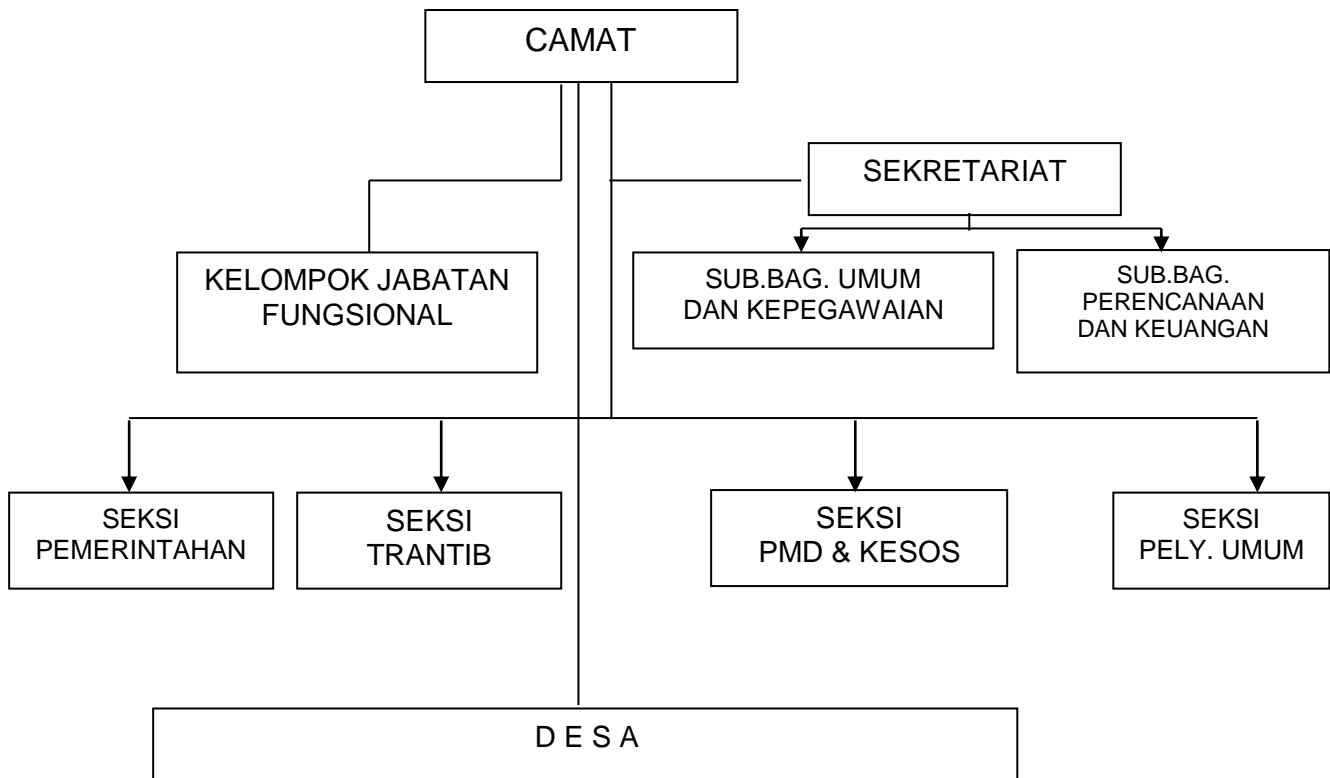
No	Nama Barang	Jumlah	Jml. Harga dan Jumlah
1	Tanah	2 Bidang	1.061.880.000,-
2	Bangunan Gedung	7 Unit	199.800.000,-
3	Alat Angkutan	4 Unit	41.200.000,-
4	Alat Kantor dan RT	366 Buah	62.895.740,-
	Jumlah		1.365.775.740,-

#### 2. Kelengkapannya ( Sarana dan Prasarana Kantor )

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Summersari didukung dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

1. Gedung kantor : 1 unit
2. Rumah dinas Camat : 1 unit
3. Aula : 1 unit
4. Musholla : 1 unit
5. Kendaraan roda 4 (empat) : 2 buah
6. Kendaraan roda 2 (dua) : 1 buah
7. Mesin ketik : 0 buah
8. Personal Computer ( PC ) : 5 unit
9. Note Book : 3 buah
10. Kursi kerja : 36 buah
11. Meja rapat : 1 buah
12. Pesawat telepon : 2 buah
13. Kursi Rapat : 50 buah
14. Felling Cabinet : 7 buah
15. Lemari : 10 buah
16. Telpon fax : 1 buah
17. Meja podium : 1 buah
18. AC : 2 buah

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANGSALSARI  
KABUPATEN JEMBER**



Bagan Organisasi Kecamatan

(Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 61 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember)

## 2.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsalsari

### 2.2.1. Keadaan Sekarang

Kinerja Kantor Kecamatan Bangsalsari tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Kelancaran kegiatan kantor
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Desa dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Bangsalsari menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 8 ( delapan ) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016 – 2021		% PENCAPAIAN TARGET
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Prosentase tersedianya administrasi per- kantor	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan kinerja aparatur kecamatan	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase tercapainya pelaksanaan pembangunan jalan diwilayah kecamatan	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase tersedianya sarana pelaksanaan E-KTP di kecamatan	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase terselenggaranya kegiatan pembinaan PKK di Kecamatan	100 %	100 %	100 %
7	Prosentase tersedianya pedoman perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %
8	Prosentase tersedianya dokumen skala prioritas hasil musrenbang tingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %

Dari 8 ( delapan ) indikator tersebut nampak bahwa 8 ( delapan ) indikator berhasil mencapai 100 %.

### **2.2.2. Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang**

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kecamatan Bangsalsari dikarenakan penyampaian informasi kurang , sehingga banyak masyarakat yang memang belum tahu tentang perda tersebut. Diharapkan untuk yang akan datang dan selanjutnya dari Dinas yang terkait dan bekerjasama dengan Kecamatan apabila ada perubahan atau peraturan baru hendaknya diadakan sosialisasi yang menghadirkan masyarakat dan instansi sektoral di tingkat Kecamatan.
3. Masyarakat kurang proaktif dengan Aparat yang ada di Wilayah dalam menginformasikan kejadian –kejadian yang ada di Lingkungan masyarakat, sehingga masih ada kejadian atau huru – hara dilingkungan yang tidak terselesaikan dan mengganggu ketentraman dan keamanan dilingkungan, diharapkan kedepan dari Aparat yang membidangi Kamtibmas ditingkatkan pemantauan keliling dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat di wilayah.
4. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya Permintaan Laporan Kegiatan dari Kabupaten, Kecamatan ataupun Instansi Sektoral yang terlambat. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Pentingnya kordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Desa.

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD  
PADA RENSTRA SKPD 2016-2021**

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Pagu Indikator	SKPD
				2011	2012	2013	2014	2015		
1	Program Administrasi Perkantoran	meningkatkan Pelayanan Adm. Masyarakat	Tercapainya pelayanan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	533.491.800	Kec. Bangsalsari
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Memenuhi kebutuhan sarana & prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana & prasarana aparatur	100%	0%	0%	100%	100%	275.394.200	Kec. Bangsalsari
3	Program Disiplin Aparatur	Disiplin kerja aparatur	Tercapainya disiplin kerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	37.120.000	Kec. Bangsalsari
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	Terwujudnya sarana transportasi (35 Paket)	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000.000	Kec. Bangsalsari
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	tertib administrasi kependudukan masyarakat	tercapainya Target perekaman E-KTP	0%	100%	100%	100%	100%	40.000.000	Kec. Bangsalsari
6	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Balita, remaja dan wanita masyarakat	Tercapainya kesejahteraan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	150.000.000	Kec. Bangsalsari

7	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan	Lingkungan masyarakat yang memerlukan pengamanan	Tercapainya keamanan dalam masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	448.974.000	Kec. Bangsalsari
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan program	0%	100%	100%	100%	100%	10.420.000	Kec. Bangsalsari
9	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pempdes			0%	0%	0%	0%	0%		Kec. Bangsalsari
10	Peningkatan Kerukunan Kehidupan beragama masyarakat			0%	0%	0%		100%	4.000.000	Kec. Bangsalsari
Jumlah									2.995.400.000	Kec. Bangsalsari

### **BAB III**

#### **ISU – ISU STRATEGIS**

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor ; 61 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012. adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **3.1 Identifikasi permasalahan**

Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bangsalsari mempunyai tugas – tugas dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan –permasalahan, antara lain sebagai berikut :

- Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
- Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
- Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;
- Pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal;

### **3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran system yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulitdiprediksi selama masa yang tersebut. Pernyataan visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Visi Bupati Kabupaten Jember untuk Lima Tahun Kedepan yaitu “**JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI**”

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi inteoretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yangnyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja.

Visi Bupati Jember ini jabarkan kedalam tiga misi, yaitu:

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tersebut di atas dijabarkan ke dalam 22 janji kerja, yaitu :

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK
2. Memberikan 5000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan public

4. Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD
5. Menjadikan Jember sebagai pusat embarkasi Haji wilayah Timur Indonesia
6. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi
8. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka
9. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan Koperasi
10. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian
11. Menata dan merevitalisasi industry tembakau dengan meningkatkan produktivitas sector ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau
12. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan
13. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Dhuafa
14. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekat ke masyarakat, antara lain : merevitalisasi Puskesmas, Menyediakan 3 dokter di setiap puskesmas dan ambulans di setiap desa
15. Membangun layanan usaha dan layanan public satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja
16. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun system anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS

17. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
18. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW
19. Mengembangkan industry kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama
20. Merintis dan mengembangkan bandara Jember menjadi bandara komersial
21. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman public
22. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga berkebutuhan khusus, ramah ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

### **3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi , fleksibilitas, distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan , arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan.

Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Jember pada tahap pertama RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Jember antara lain , Kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk Jember Maju Iptek dan Imtak, Jember Mandiri, Jember Sehat, Jember Kuat dan Bersih, Jember Kota Wisata dan Berbudaya

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Jember yaitu :

- a. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- b. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
- c. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM

- f. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- g. Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan yang lestari dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir
- h. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik
- i. Pembangunan kedaulatan pangan melalui penyediaan pangairan, penyediaan pupuk tepat waktu dan optimalisasi lahan pertanian
- j. Pengembangan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman publik.

### **3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Penataan ruang Kabupaten Jember bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jember maka ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan penataan ruang wilayah yang meliputi :

1. Pengembangan agribisnis dan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal
2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah
4. Percepatan perwujudan fungsi dan peran serta pusat kegiatan secara berhirarki
5. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif
6. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung
7. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana
8. Pengembangan fungsi social budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara
10. Pengelolaan kawasan pesisir.

Kecamatan Bangsalsari masuk pada pengembangan pusat kegiatan wilayah zonasi perkotaan, mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :

- a. Pusat Pemerintahan
- b. Pusat Perdagangan dan jasa
- c. Pusat Pendidikan
- d. Pusat Kesehatan

### 3.1 KEKUATAN DAN KELEMAHAN INTERNAL

#### 3.1.1 Faktor Kekuatan ( Strong )

Menggunakan Analisis Lingkungan Strategis Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat).

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah :

- a. Struktur organisasi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember berdasarkan pada peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Jember Adapun mengenai Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut adalah :

Kedudukan :

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- b. Suasana kerja di Kecamatan Bangsalsari yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan ketaivitas individual maupun kelompok (team work).
- c. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung , ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.
- d. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah masih terbatas hanya sebagai pelaksana teknis kewilayahan, sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan kurang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Hubungan dinamis dalam dengan masing-masing SKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, parsitisipatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).
- f. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi

### **3.1.2 Faktor Kelemahan ( Weakness)**

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan diatas, ternyata Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut :

- a. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.
- b. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
- c. Belum termaksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan kode rekening untuk kecamatan hanya program rutin yang sama disetiap SKPD, sedangkan untuk menunjang tupoksi Kepala seksi tidak tercantum dalam Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- d. Sangat terbatasnya personil yang ada di Kecamatan, hal ini diakibatkan banyak rumor yang berkembang bahwa yang ditempatkan di kecamatan adalah pegawai buangan atau bermasalah.
- e. Kualitas Sumber daya manusia yang masih minim hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil Kecamatan Bangsalsari

## **3.2 PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNAL**

### **3.2.1 Faktor Peluang Eksternal ( Opportunity )**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Bangsalsari dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Bangsalsari dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah :

- b. Perubahan Paradigma juga terjadi pada Permandagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD
- c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Bangsalsari untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan :
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bangsalsari.
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi setiap pegawai;
- f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

### **3.2.2. Faktor Tantangan ( Threat )**

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bangsalsari dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah :
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Bangsalsari harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Bangsalsari dengan memanfaatkan potensi dan peluang serta mendongkrak Kabupaten Jember sebagai Pusat Pelayanan Jasa Terpadu.

- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah:
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal sebagai instansi Pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

### **3.3 RUMUSAN PERMASALAHAN STRATEGI YANG DIHADAPI MASA KINI**

Seiring dengan telah ditetapkannya UU No.25/2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota (pasal 14 ayat 1 UU No. 32/2004). Maka kondisi yang diinginkan agar fungsi koordinator pelayanan administrasi umum Pemerintah an dapat berjalan secara efektif adalah sebagai berikut :

- Mendukung koordinasi antar SKPD
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar masyarakat dan SKPD.
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi implementasi kebijakan kepala daerah:
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat ; dan
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **3.4 RUMUSAN PERUBAHAN KECENDERUNGAN MASA DEPAN YANG BERPENGARUH PADA TUPOKSI**

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat sedikitnya 2 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jember. Adapun 2 (dua) tema penting dimaksud, adalah sebagaimana berikut :

- Kemajuan Tekhnologi Telematika akan semakin pesat menyebabkan Persaingan kegiatan ekonomi Internasional akan semakin tinggi
- Aksesibilitas Informasi akan semakin mudah diperoleh menjadikan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan semakin tinggi.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat dirumuskan strategi dengan menggunakan metoda analisis SWOT, Strengths ( Kekuatan ) Weakness ( Kelemahan ) Opportunities (Peluang ) Threats ( Ancaman ) yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) strategi, yaitu :

➤ **Strategi menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan dan mengatasi ancaman :**

1. Tingkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Tingkatkan keterlibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan
3. Maksimalisasi serta memanfaatkan peluang peningkatan kualitas SDM
4. Mantapkan dan tingkatkan iklim kerja internal
5. Tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
6. Terapkan system reward-punishment secara konsumsien
7. Tingkatkan kemampuan SDM melalui Diklat teknis substansial, seminar, lokakarya dan sebagainya.
8. Tingkatkan keimanan dan ketaqwaan SDM melalui kegiatan-kegiatan keagamaan
9. Tingkatkan koordinasi SKPD.
10. Tingkatkan pemamfaatan teknologi informasi sebagai coordinator kebijakan
11. kepala daerah di tingkat wilayah.
12. Tingkatkan pembiayaan dalam mendorong pemerintahan untuk koordinasi selaku pelaksana teknis kewilayahan.

➤ **Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman :**

1. Lakukan pengkajian tentang Tupoksi;
2. Tingkatkan koordinasi/ dialog/ negosiasi/ kerjasama/ dengan SKPD Kabupaten dan Stakholders:
3. Mantapkan pemamfaatan system informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
4. Mantapkan kemampuan masyarakat SDM sesuai dengan perkembangan IPTEK dan berdasarkan amanah;
5. Tingkatkan kemampuan sebagai salah satu institusi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

➤ **Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang :**

1. Tingkatkan keterlibatan stakeholder dalam setiap pelaksanaan kebijakan;
2. Tingkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya;
3. Kembangkan need assessment dalam rekrutmen pegawai;
4. Tingkatkan efektifitas system pengendalian dan evaluasi kegiatan kewilyahan
5. Tingkatkan pemamfaatan system informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat;
6. Pemamfaatan keberdaan SKPD yang ada untuk pengembangan IPTEK.

➤ **Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman:**

1. Optimalkan Partisipasi Stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
2. Apresiasi Kebijakan di lingkungan pemerintah, masyarakat dan swasta/dunia usaha;
3. Tingkatkan Kemampuan SDM melalui pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya;
4. Kembangkan need assessment dalam rekrutmen pegawai;

**3.5 RUMUSAN PERUBAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG PERLU DILAKUKAN ( Untuk lebih Efisien dan Efektif )**

Berdasarkan analisis SWOT tersebut. Maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Beberapa faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember terdiri dari :

1. Kemampuan menggalang partisipasi stakeholder implemtasi kebijakan Kepala Daerah;
2. Adanya komitmen untuk melaksanakan kerjasama dengan seluruh SKPD se-Kabupaten Jember
3. Adanya system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
4. Tersedianya system informasi manajemen yang handal;
5. Tersedianya aparatur yang professional dan didukung oleh system pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan prestasi.

Mengacu kepada factor-faktor keberhasilan berikut, maka dari setiap misi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember perlu ditetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai penjabaran dari misi-misi yang telah ditetapkan. Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, agar dapat menggambarkan secara spesifik indicator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarnya, dengandukungan data kuantitatif sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 VISI

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Dalam perumusan visi, hendaknya :

- Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin dicapai;
- Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi menunjukkan kinerja yang baik;
- Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan;
- Menjembatani masa kini dan masa mendatang;
- Gambaran yang realistis dan kredibel, dengan masa depan yang menarik;
- Sifatnya tidak statis dan tidak selamanya.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Kecamatan Bangsalsari adalah: **“BERSINERGI MENCIPTAKAN PELAYANAN PRIMA YANG PROFESIONAL DAN KREDIBEL PADA MASYARAKAT”**

Visi tersebut mengandung makna adanya keinginan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, profesional dan bertanggungjawab dengan maksud agar tercipta penghargaan dari masyarakat kepada pemerintah Kecamatan sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## 4.2 MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan Bangsalsari.

Adapun Misi Kecamatan Bangsalsari adalah sebagai berikut:

- Bersinergi ( Bersatu ) memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien kepada masyarakat;
- Meningkatkan pembangunan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat;

## 4.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun.

Kecamatan Bangsalsari menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance), dan bersih (clean govermant) serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan “**JEMBER BARU JEMBER BERSATU.**”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan ,khususnya pemerintahan kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan Indikator sasarannya adalah

Prosentase SKPD yang menjalankan pelayanan publik bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat.

## **STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD**

### **4.4 STRATEGI**

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kaliwates, adapun strategi Kecamatan Kaliwates yaitu :

1. Mensinergikan Potensi dan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
2. Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Kecamatan dan Desa
3. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
4. Meningkatkan Kegiatan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik
5. Meningkatkan dukungan bagi Peningkatan Kapasitas atau Kinerja Pelayanan Publik

### **4.5 KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Kaliwates yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Layanan dan Koordinasi di Tingkat Kecamatan
2. Membangun Pola Kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan Aspiratif.
3. Mengakomodasi proses Perubahan dan Reformasi Birokrasi secara Optimal
4. Meningkatkan dukungan bagi Peningkatan Kapasitas atau Kinerja Pelayanan Publik

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : **“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri”**

Misi I : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	KEBIJAKAN
<p>1. Memperkuat kelembagaan Desa dalam meningkatkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan <b>JEMBER KUAT DAN BERSIH.</b></p>	<p>1. Meningkatnya Akselerasi pelaksanaan kelembagaan Desa sesuai dengan UU Desa / Perda / Peraturan.</p>	<p>1. Mensinergikan Potensi &amp; peran serta masyarakat dalam pembangunan.                      2. Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Kec. dan Desa,                      3. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan di Kecamatan.                      4. Meningkatkan Kegiatan yang berorientasi pada Pelayanan Publik                      5. Meningkatkan dukungan bagi Peningkatan Kapasitas atau Kinerja Pelayanan Publik</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Layanan dan Koordinasi di Tingkat Kecamatan.                      2. Membangun Pola Kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan Aspiratif.                      3. Mengakomodasi proses Perubahan dan Reformasi birokrasi secara optimal.                      4. Peningkatkan dukungan bagi Peningkatan Kapasitas atau Kinerja Pelayanan Publik</p>

**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**

Tujuan	Sasaran	Indikator & Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pd Th Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Peanggung Jawab	Lokasi					
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pd akhir periode Rentra SKPD								
							Tar get	Rp	Targ et	Rp	Trget	Rp	Targ et	RP	Targ et	Rp	Targ et	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Memperkuat kelembagaan Desa dalam Meningkatkan Ketertiban dan kesejahteraan masyarakat desa dalam Rangka <b>JEMBER KUAT DAN BERSIH</b>	Meningkatkan Akselerasi Pelaksanaan Kelembagaan Desa sesuai dengan UU Desa / Perda / Peraturan	Angka indeks desa membangun	4	-Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kualitas pelayanan kepada masyarakat	23.250.000	100		100		100		100		100		100				Kec. BSS				
				- Penyediaan tenaga Pndukung Klanc. Ops Kntor	-terpenuhinya gaji tenaga honorer	17.520.000																			
				- pnunjang adm. & Oprs. Rutin kntor / kdinasaan	- trsediany pnunjang adm. & Oprs. Kntor	119.664.000																			
				- pengadaan Mebeleur	-tersedianya kebutuhan mebeleur kntor	19.000.000	100		100		100		100		100		100		100					Kec. BSS	
				- Pmeliharaan Rutin / Berkala Rumah dinas	-terpeliharanya prawatan rmah dinas	6.000.000																			
				- Pmeliharaan Rutin / Berkala Gedung kntor	-tersedianya gedung kntor yang layak	20.000.000																			
				- Pmeliharaan Rutin / Berkala Mobil jabatan	-terpeliharanya gedung kntor yang layak	12.500.000																			
				- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	-terpenuhinya kendaraan/Oprs. Yang baik & layak pakai	6.680.000																			

			- rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	-terpenuhi Rehabilitasi gedung kantor	150.000.000														
			- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri /pakaian Olah Raga/Pakaian khusus hari-hari tertentu	- terpenuhinya Pakaian kerja lapangan	4.000.000	100		100		100		100		100					Kec. BSS
			-prnyelenggaraan peringatan & Upac. Hari-hri bsar Nasional	-tercapainya tingkat kdisiplinan & rsa Nasionalme	4.020.000														
			-Pembangunan Jalan	-meningkatnya kualitas jln desa	300.000.000	100		100		100		100		100					Kec. BSS
			-Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	-terwujudnya kelancaran pelaksanaan E-KTP	60.000.000	100		100		100		100		100					Kec. BSS
			- Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-Meningkatnya aktifitas lembaga pengarusutama n gender dan anak	30.000.000	100		100		100		100		100					Kec. BSS
			-Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	-tersedianya personil keamanan dan Ketertiban yang dibutuhkan	148.800.000	100		100		100		100		100					Kec. BSS
			-Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	-terpenuhinya program pembangunan yang terencana dan terarah sesuai kbutuhan Masyarakat.	4.270.000	100		100		100		100		100					Kec. BSS

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Bangsalsari dengan RPJM Daerah Kabupaten Jember, maka program dan kegiatan yang akan di jalankan selama priode 2016-2021 serta ditambah dengan satu tahun masa transisi (2016) adalah : Untuk Tahun 2016 agenda program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih sebagai bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah di dukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJM Daerah adapun program dan kegiatan untuk tahun 2016, adalah sebagai berikut :

**A. TAHUN 2016**

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

**1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Inputs : APBD Rp. 23.250.000,00

Outputs : memenuhi kebutuhan Sarana Pendukung Operasional Kantor Kecamatan

Outcomes : Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Agar Lebih Efektif Dan Efisien.

Kelompok sasaran : Aparatur Pemerintah Kecamatan

**2. Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor**

Inputs : APBD Rp. 17.520.000,00

Outputs : Memenuhi Kebutuhan Tenaga Pendukung Operasional Kantor Kecamatan

Outcomes : Terpenuhinya Sarana Penunjang Administrasi Kantor Dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok sasaran : Aparatur Pemerintah Kecamatan

3. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan

Inputs	: APBD Rp. 119.664.000,00
Outputs	: Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan,Barang dan Jasa serta Kebutuhan Penunjang Administrasi Dan Operasional Rutin
Outcomes	: Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal.
Kelompok sasaran	: Aparatur Pemerintah Kecamatan.

**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan :

1. Pengadaan Meubeleur

Inputs	: APBD Rp. 19.000.000,00
Outputs	: Memenuhi Kebutuhan Meubeleur Kantor Kecamatan
Outcomes	: Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat agar lebih Efektif dan Efisien
Kelompok sasaran	: Aparatur Pemerintah Kecamatan

2. Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas

Inputs	: APBD Rp. 6.000.000,00
Outputs	: Terciptanya Rumah Dinas Guna Menunjang Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Outcomes	: Kinerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat Semakin Meningkat
Kelompok Sasaran	: Rumah Dinas

3. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

Inputs	: APBD Rp. 20.000.000,00
Outputs	: Dilaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan
Outcomes	:Meningkatkan Prosentase Kondisi Gedung Kantor Kecamatan
Kelompok sasaran	: Gedung Kantor Kecamatan

4. Pemeliharaan rutin / berkala Mobil Jabatan

Inputs : APBD Rp. 12.500.000,00  
Outputs : Pemeliharaan Mobil Jabatan Camat  
Outcomes : Mobil Jabatan Camat menjadi terpelihara dengan baik dan siap pakai dan layak jalan  
Kelompok Sasaran : Mobil Jabatan Camat

5. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Inputs : APBD Rp. 6.680.000,00  
Outputs : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional baik Roda 4  
Outcomes : Meningkatkan Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional baik Roda 4 dan Roda 2 yang layak pakai  
Kelompok Sasaran : Kendaraan Operasional Kecamatan

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Inputs : APBD Rp. 150.000.000,00  
Outputs : Atap Gedung Kantor yang akan diperbaiki  
Outcomes : Kenyamanan Aparatur Kecamatan Semakin Meningkat dalam melaksanakan Tugas Kedinasan sehari-hari  
Kelompok Sasaran : Gedung Kantor Kecamatan

### III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan /Pakaian Korpri /Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

Inputs : APBD Rp. 4.000.000,00  
Outputs : Peneyediaan Pakaian Olahraga bagi Karyawan Kecamatan  
Outcomes : Melaksanakan Pengadaan Pakaian Olahraga bagi Karyawan Kecamatan  
Kelompok sasaran : Aparatur Pemerintah Kecamatan

## 2. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional.

Inputs	: APBD Rp 4.020.000,00
Outputs	: Pelaksanaan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional
Outcomes	: Meningkatkan Tingkat Disiplin Perbaiki Kinerja Aparatur dan Sikap Nasionalisme
Kelompok sasaran	: Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa

## IV. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan :

### 1. Pembangunan Jalan

Inputs	: APBD Rp. 300.000.000,00
Outputs	: Panjang Jalan yang Dibangun / Diperbaiki
Outcomes	: Mempermudah dan Meningkatkan Akses Masyarakat dalam Beraktifitas Sehari-hari
Kelompok sasaran	: Jalan yang Diperbaiki

## V. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan :

### 1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan).

Inputs	: APBD Rp. 10.000.000,00
Outputs	: Penyediaan Sarana Pelayanan E-KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya di tingkat Kecamatan.
Outcomes	: Mewujudkan Pelaksanaan E-KTP dan Administrasi Kependudukan Lainnya secara berkelanjutan dan berhasil guna
Kelompok sasaran	: Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Warga Masyarakat

## **VI. Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Kegiatan :

### **1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Inputs	: APBD Rp. 30.000.000,00
Outputs	: Pelaksanaan Aktifitas/Kegiatan Kelembagaan Organisasi PKK dan Pembinaan Kader Posyandu dan Warga Desa Wisma
Outcomes	: Meningkatnya Partisipasi Aktif Kader PKK, Kader Posyandu dan Warga Desa Wisma guna Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat di Lingkungan Setempat
Kelompok sasaran	: Lembaga PKK Desa dan Kecamatan

## **VII. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan**

Kegiatan :

### **1. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat**

Inputs	: APBD Rp.148.800.000,00
Outputs	: Membentuk Satuan Keamanan Lingkungan di Masing-masing Desa Se wilayah Kecamatan Bangsalsari
Outcomes	: Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Mengamankan Lingkungan sekitarnya
Kelompok sasaran	: Aparatur Pelaksana Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat

## VIII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Inputs : APBD Rp. 4.270.000,00

Outputs : Jumlah Buku Hasil Musrenbang dan Program Kebijakan dan Pelayanan Publik

Outcomes : Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Kelompok sasaran : Aparatur Pemerintah Kecamatan

➤ Program yang dilaksanakan Kecamatan Bangsalsari adalah :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok sasaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Indikator kinerja : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelompok sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Indikator kinerja : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kelompok sasaran : Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan kinerja Aparatur Kecamatan

Indikator kinerja : Meningkatnya disiplin berpakaian guna meningkatkan kualitas kinerja Aparatur

4. Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kelompok sasaran : Tercapainya pelaksanaan pembangunan Jalan di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja : Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Jalan di Wilayah Kecamatan

5. Program : Penataan Administrasi Kependudukan  
Kelompok sasaran : Tersedianya sarana pelaksanaan e-KTP di Kecamatan  
Indikator kinerja : Meningkatnya pelaksanaan Pelayanan e-KTP di Kecamatan
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  
Kelompok sasaran : Terselenggaranya kegiatan pembinaan PKK di Kecamatan Bangsalsari  
Indikator kinerja : Terselenggaranya pengarusutamaan gender dan Anak
7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan  
Kelompok sasaran : Tersedianya Dokumen skala prioritas hasil musrenbang Tk. Kecamatan  
Indikator kinerja : Tersusunnya pedoman perencanaan /pelaksanaan pembangunan
8. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kelompok sasaran : Tersedianya Dokumen skala prioritas hasil musrenbang Tk.Kel.dan Kecamatan  
Indikator kinerja : Tersusunnya pedoman perencanaan /pelaksanaan Pembangunan

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang akurat mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja akan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.

Prestasi lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

SKPD Kecamatan Bangsalsari menargetkan setiap tahun sampai dengan akhir RPJMD bernilai Baik ( B ) berdasarkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ).